E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 2 Nomor 1 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE
ON INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Fenomena Pasca-Kebenaran: Belajar dari Sejarah, Menyongsong Tahun Politik 2024

Amadea Prajna Putra Mahardika [a,1]
[a] *Prodi Magister Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*
[1] dionisiusamadea@gmail.com

Kata Kunci:
Keyakinan, Solusi "Empat-IS", Media Massa, Kampanye Politik, Pasca-Kebenaran

Abstrak

Tulisan ini hendak menguraikan pelbagai aspek fenomena Pasca-Kebenaran secara umum, antara lain pengertian, penyebab kemunculannya, unsur atau ciri-cirinya, serta dampak-dampaknya. Agar lebih mudah dipahami, akan disediakan pula beberapa contoh nyatanya dalam bidang politik dan media mas-sa, baik yang terjadi di dunia internasional maupun di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, melalui studi pustaka dan internet. Belajar dari sejarah, fenomena Pasca-Kebenaran marak terjadi dalam masa kampanye politik menjelang pemili-han umum. Maka, menjelang tahun 2024 yang merupakan tahun politik di Indonesia, perlu diupayakan bagaimana supaya dam-pak negatif Pasca-Kebenaran dapat diantisipasi. Pasalnya dam-pak negatif tersebut dapat menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada siapa saja, memberi peluang pada oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, hingga berpotensi mengancam stabilitas, keamanan, dan keutu-han bangsa. Untuk mengatasi persoalan ini, semua pihak dan otoritas yang berwenang harus bekerja sama melakukan pendeka-tan multidimensional bernama "Solusi Empat-IS" yang meliputi upaya-upaya edukasi-filosofis, sosiologis, teknologis, dan estetis.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8361
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

The Post-Truth Phenomenon: Learning from History, Towards the 2024 Political Year

Keywords:
conviction, "Four-IS" Solution, mass media, political campaign, Post-Truth . .

Abstract
This writing aims to dissect several aspects of the Post-Truth phenomenon in general, including its definition, the reasons behind its emergence, its elements or characteristics, as well as its impacts. To make it easier to comprehend, real-life examples will be provided, both in the political and mass media spheres, which happened both internationally and within Indonesia. In this research, we use qualitative methods through literature and internet review. Learning from history, the Post-Truth phenomenon is rampant during political campaigns leading up to elections. Therefore, as the year 2024 approaches, a significant political year in Indonesia, efforts need to be made to anticipate the negative impacts of Post-Truth. These negative consequences can foster distrust in society, provide opportunities for irresponsible individuals to take advantage, and potentially threaten the stability, security, and unity of the nation. To address this issue, all parties and authorities involved must collaborate and employ a multidimensional approach called the "Four-IS Solution," which includes efforts in philosophical, sociological, technological, and aesthetic education.

Pendahuluan

Pada periode Februari hingga berpuncak pada Maret 2020, kepanikan masyarakat Indonesia tentang virus *Corona* (COVID-19) merajalela. Pada periode Januari-Maret 2020, per Selasa, 17 Maret 2020 terdapat sedikitnya 245 berita hoaks seputar COVID-19 yang berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia.[1] Bila ditelusuri sebab-sebabnya, ternyata kepanikan tersebut muncul akibat beredarnya hoaks (*hoax*). Kabar bohong yang menyebar di tengah masyarakat membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tidak wajar yang kontraproduktif, seperti memborong barang-barang secara panik (*panic buying*); mengkhawatirkan kesehatan secara berlebihan, seperti menggunakan masker ke mana-mana meskipun sehat; ataupun bertindak secara berlawanan dengan apa yang dianjurkan otoritas berwenang; seperti tetap bepergian ke tempat ramai walaupun dianjurkan untuk tinggal di rumah.

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Laporan Isu Hoaks Corona Virus," 13 Maret 2020; Fransiskus Wisnu Wardhana Dany, "Kabar Bohong Melapangkan Jalan Korona," *Kompas.id*, 17 Maret 2020, https://www.kompas.id/baca/metro/2020/03/18/kabar-bohong-melapangkan-jalan-korona/.

Sebelum kasus hoaks seputar COVID-19 itu, kita tentu ingat kacau balau yang terjadi di tengah masyarakat saat pemilu (baik Pilkada 2017 maupun Pemilu Serentak 2019) akibat hoaks. Di sosial media, misalnya, jelas terlihat polarisasi masyarakat yang terbelah antara "cebong" (sebutan bagi pendukung Presiden Joko Widodo) dengan "kampret" (sebutan bagi pendukung Prabowo Subianto). Jumlah hoaks di tahun 2019 tercatat mencapai puncaknya, yaitu 175 berita hoaks di bulan Januari, 353 di bulan Februari, 453 di bulan Maret dan 353 di bulan April hingga pasca hari pemilihan umum.[2] Hal yang amat disayangkan adalah kekacauan yang terjadi akibat hoaks selalu terjadi berulang kali. Akibat kekacauan tersebut, sudah banyak pihak yang dirugikan. Itulah mengapa fenomena yang menurut para ahli disebut sebagai "Era Pasca-Kebenaran" atau *Post-Truth Era* ini harus dihentikan, diatasi dan dicari solusinya sedemikian rupa supaya tidak berulang dan semakin merugikan masyarakat. Hal ini bukan berarti sama sekali belum ada usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama oleh pemerintah. Hanya saja, solusi yang ditempuh tersebut ternyata belum berhasil menyentuh akar persoalan itu sendiri.

Berangkat dari keprihatinan-keprihatinan tersebut, tulisan ilmiah ini disusun. Penyusunan karya tulis ilmiah ini akan mengikuti cara kerja filsafat, yaitu menelisik arti dan definisi konsep-konsep Pasca-Kebenaran secara tajam, mencari sebab-sebab kemunculannya, mengidentifikasi ciri-cirinya, dan juga dampak-dampak yang ditimbulkannya. Contoh kasus sesekali akan ditampilkan untuk menunjukkan bahwa fenomena ini sungguh-sungguh terjadi dan bukan hanya teori atau fantasi para ahli belaka. Setelah semuanya jelas, barulah kita beranjak untuk mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan ini. Secara khusus, solusi tersebut diarahkan untuk menyongsong tahun politik 2024 di Indonesia yang dikhawatirkan akan sarat dengan fenomena Pasca-Kebenaran. Oleh karena masalahnya dikaji secara komprehensif dan dari pelbagai sudut pandang, dan masalah Pasca-Kebenaran sendiri memang kompleks, maka solusi yang diajukan juga bersifat multidimensional. Konsekuensinya, pihak-pihak yang seharusnya terlibat untuk penyelesaiannya juga berasal dari pelbagai latar belakang bidang keahlian. Ini adalah proyek bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan suatu perkara yang tanggung jawabnya dapat dilimpahkan hanya kepada satu pihak, yang biasanya pemerintah.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yakni studi pustaka. Konsep-konsep kunci mengenai Pasca-Kebenaran dalam tulisan ini dirangkum dari pelbagai buku dan artikel yang otoritatif dan dapat diyakini validitasnya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa konsep-

[2] Reynas, "Data Kominfo Tunjukkan Jumlah Konten Berita Hoax Meningkat Tajam Sejak Pertengahan Tahun Lalu," *Tribunnews.com,* 25 April 2019, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/25/data-kominfo-tunjukkan-jumlah-konten-berita-hoax-meningkat-tajam-sejak-pertengahan-tahun-lalu.

konsep tersebut sungguh-sungguh terjadi dalam dunia nyata, dilakukan penelitian atas media-media internet (daring). Adapun media massa daring yang digunakan sebagai objek penelitian adalah media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers karena relatif lebih bermutu dan terpercaya. Demikian pula media yang telah terverifikasi tersebut dapat dilacak jejak digitalnya dalam jangka panjang (mengingat media daring yang tidak terverifikasi sangat banyak jumlahnya dan sewaktu-waktu dapat hilang dari internet).[3]

Hasil dan Pembahasan

Definisi Pasca-Kebenaran dan Sejarah Istilahnya

Era dewasa ini sering disebut para ilmuwan sebagai Era Pasca-Kebenaran. Definisi Pasca-Kebenaran adalah suatu keadaan di mana banyak hal dianggap seolah-olah benar, meski sesungguhnya tidak benar sama sekali.[4] Kebenaran di sini utamanya berarti kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Pasca-Kebenaran juga merujuk pada situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif.[5]

Meskipun menurut d'Ancona istilah Pasca-Kebenaran sudah muncul sejak 1992, namun istilah tersebut baru populer kembali belakangan ini. Peristiwa yang sering dianggap menjadi tonggak kebangkitan kembali Pasca-Kebenaran adalah kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*). Namun fenomena Pasca-Kebenaran tidak hanya terjadi di Eropa dan Amerika. Negara kita, Indonesia, ternyata juga tidak luput dari perkembangan fenomena tersebut.[6] Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Pilkada 2017 dan Pemilu Serentak 2019 adalah bukti nyata bahwa bangsa kita memasuki era Pasca-Kebenaran.

Tanda utama era Pasca-Kebenaran adalah maraknya hoaks. Hoaks adalah istilah untuk berita bohong atau berita palsu. Beredarnya hoaks di tengah masyarakat secara tidak terkendali telah menyebabkan pelbagai pengaruh buruk, di antaranya meningkatnya prasangka, kecurigaan antar masyarakat, ujaran kebencian (*hate speech*), intoleransi hingga tindakan

[3] Gilang Galiartha, "Daftar media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers," *Antara News*, 5 Februari 2017, https://www.antaranews.com/berita/610730/daftar-media-yang-sudah-terverifikasi-oleh-dewan-pers.

[4] *Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (New York: St. Martin's Press, 2004), 15.

[5] Matthew d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back* (London: Ebury Press, 2017), 12–13.

[6] Semuel S. Lusi, "Melampaui 'Post-Truth,'" *detiknews*, Mei 2019, https://news.detik.com/kolom/d-4534507/melampaui-post-truth.

melawan hukum seperti teror, persekusi, pembunuhan, dan pelanggaran HAM lainnya.[7]

Penyebab Kemunculan, Ciri-Ciri, dan Mekanisme Perkembangan Fenomena Pasca-Kebenaran

Berdasarkan pelbagai referensi, terdapat beberapa penyebab, ciri, dan mekanisme perkembangan fenomena Pasca-Kebenaran, di antaranya:

a. Kesalahan signifikan yang dilakukan lembaga-lembaga yang terpercaya secara konvensional. Beberapa lembaga seperti pemerintah, perbankan, hingga media arus utama (*mainstream*) tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada mereka. Padahal selama ini lembaga-lembaga konvensional tersebut menjadi pegangan utama masyarakat. Maka, dampak lain dari kesalahan tersebut adalah masyarakat menjadi terombang-ambing dan mudah dikacaukan dengan kabar bohong.[8]

Contohnya yang cukup termasyhur secara internasional adalah "kasus Sokal" (*Sokal affair*). Pada 1996, seorang profesor Fisika pada Universitas New York dan Universitas College London bernama Alan Sokal melakukan eksperimen dengan mengirimkan sebuah artikel hoaks dan tidak masuk akal sama sekali ke sebuah jurnal berjudul Social Text. Jurnal tersebut dikenal dengan fokus pembahasannya pada budaya pascamodern (*postmodern cultural studies*). Sokal melakukan eksperimen tersebut dengan maksud untuk menguji keketatan dan rigoritas akademis jurnal tersebut.

Ternyata artikel berjudul "*Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*" itu dimuat di jurnal *Social Text* edisi musim semi/musim panas 1996. Tiga pekan setelah artikel tersebut dipublikasikan, Sokal menulis di majalah *Lingua Franca* dan mengungkapkan bahwa artikel itu hoaks. Eksperimen Sokal itu membuka rahasia beberapa jurnal termasyhur yang ternyata tidak melakukan pengecekan akademis serta verifikasi ilmiah kepada para ahli terkait artikel yang dipublikasikan.[9]

b. Munculnya industri yang sengaja dan secara masif memproduksi dan menyebarkan berita bohong untuk mencari keuntungan. Setelah kepercayaan masyarakat dikikis oleh kekeliruan fatal lembaga-lembaga konvensional, industri penyebar kebohongan semakin memperparah keadaan tersebut. Di Amerika Serikat, industri tersebut sudah terbongkar dan diproses secara hukum. Industri semacam itu sungguh-sungguh serius,

---

[7] Desy Susilawati, "Begini Dampak Berita Hoax," REPUBLIKA.co.id, 2017, https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoax.

[8] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 36–38.

[9] Alan D. Sokal, "A Physicist Experiments With Cultural Studies," 1996, https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html.

terbukti dari nilai pemasukannya yang mencapai jutaan dolar Amerika Serikat (US$). Penyebaran kebohongan secara sistematis sungguh-sungguh merupakan ancaman. Kebohongan-kebohongan yang mereka sebarkan bertujuan untuk menutupi informasi akurat, atau untuk mencegah orang bertindak berdasarkan informasi yang benar.[10]

Salah satu contohnya adalah kasus Komite Penelitian Industri Tembakau (*Tobacco Industry Research Committee*) di Amerika Serikat.[11] Kisah berawal dari suatu riset ilmiah yang menemukan bahwa tembakau dalam rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Masyarakat percaya dengan hasil penelitian ini, sehingga penjualan rokok mulai menurun serta mulai muncul gerakan anti-rokok dengan alasan kesehatan.

Sebagai tanggapan atas situasi tersebut, didirikanlah Komite Penelitian Industri Tembakau pada 1954. Walaupun bernama 'Komite Penelitian', mereka bukanlah institusi ilmiah. Sebaliknya, komite ini adalah badan yang dibiayai perusahaan rokok untuk mengeluarkan berita atau laporan ilmiah palsu yang menyatakan bahwa tembakau itu sehat dan bukan penyebab kanker paru-paru. Walaupun akhirnya terbukti bahwa laporan mereka palsu, informasi yang disebarkan oleh komite ini telah berhasil menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Beberapa orang memercayai hasil penelitian mereka sementara beberapa orang lain meragukannya. Dengan adanya kebingungan itu, *status quo* yang menguntungkan perusahaan rokok tetap terjaga.

c. Penyebaran berita bohong disuburkan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital. Pada era digital ini, setiap orang mempunyai kesempatan dan aksesibilitas yang sama terhadap berita, baik sebagai penerima maupun pembuat. Kemudahan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan berita juga mempengaruhi meningkatnya tingkat penyebaran berita bohong.[12]

d. Fenomena Pasca-Kebenaran sangat dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat yang malas mengecek fakta.[13] Menurut Anita Wahid dari Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), masyarakat pada umumnya cenderung suka meneruskan (*forward*) sebuah berita atau pesan tanpa membacanya secara utuh terlebih dahulu serta menimbang-nimbang apakah isi berita atau pesan tersebut memang benar.[14] Biasanya mereka juga mudah terpikat oleh judul pesan yang bombastis dan sensasional (*click-bait title*) sehingga langsung meneruskannya tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dan rasionalitas pesan tersebut.

[10] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 41–42.

[11] d'Ancona, 42.

[12] d'Ancona, 52–53.

[13] d'Ancona, 141–42.

[14] Tim, "Malas Verifikasi Berita Jadi Penyebab Penyebaran Hoaks," *CNN Indonesia*, 2018, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181016231419-185-339048/malas-verifikasi-berita-jadi-penyebab-penyebaran-hoaks.

Barangkali kecenderungan ini bukan hal baru di tengah masyarakat. Akan tetapi dengan masifnya penyebaran informasi di era digital ini, kemalasan mengecek fakta dapat berakibat negatif secara lebih serius.

Salah satu berita bohong yang terkenal tapi banyak dipercaya adalah pada tahun 2016, Donald Trump menawarkan tiket gratis satu arah ke Afrika dan Meksiko bagi para imigran yang ingin meninggalkan Amerika. Tautan (*link*) berita secara otomatis menyebabkan ratusan ribu orang membaca berita yang sama sekali tidak bisa diandalkan tersebut di Facebook.

Menurut sebuah survei dari lembaga bernama Ipsos Reid, 75% orang Amerika percaya bahwa berita itu benar. Dari kubu pendukung Hillary Clinton, sebanyak 58% di antara mereka percaya pada berita itu. Sementara itu dari kubu pendukung Donald Trump, sebanyak 86% orang juga mempercayai berita bohong tersebut.[15] Semua itu dipicu oleh ketidakpedulian dan kemalasan orang dalam mengecek apakah suatu pernyataan merupakan fakta atau hoaks.

e. Fenomena Pasca-Kebenaran tidak hanya menimpa kalangan tidak terdidik dengan intelektualitas rendah, miskin, dan terbelakang, tetapi juga kaum terpelajar dan profesional.[16] Selama ini, sering kali dicitrakan bahwa penyebab merebaknya fenomena Pasca-Kebenaran adalah kurangnya daya tahan orang-orang di abad ke-21 ini (khususnya anak-anak) dalam membaca bahan bacaan cetak. Mereka tidak lagi tahan membaca buku-buku tebal dan sebaliknya cenderung lebih senang mengakses berita atau informasi dari internet yang sifatnya cepat, singkat, dan mudah tetapi dangkal. Akan tetapi, fakta di lapangan pun menunjukkan bahwa sebagian dari kaum intelektual dan profesional turut serta dalam penyebaran hoaks. Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa pun tanpa terkecuali berpotensi terdampak fenomena Pasca-Kebenaran.

f. Daya emosi atau perasaan lebih penting dalam menentukan kepercayaan daripada daya rasional atau intelektualitas.[17] Sering kali terjadi orang meneruskan pesan hoaks karena pesan tersebut berhubungan dengan orang yang dikirimi pesan tersebut. Misalnya, pesan hoaks tentang bahaya minum jamu cenderung dikirimkan kepada orang yang rutin minum jamu. Jika dilihat secara lebih saksama, para penerus pesan hoaks tersebut sesungguhnya peduli dan perhatian kepada orang lain sehingga meneruskan pesan tersebut. Namun sayangnya, kepedulian dan perhatian tersebut terlalu besar sehingga menyelubungi daya nalar dan rasionalitas.

Selain itu orang juga cenderung mempercayai apa yang ia sukai. Manakala informasi yang beredar (sekalipun hoaks) mendukung

[15] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 53.

[16] Daniel J. Levitin, *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post Truth Era* (New York: Dutton, 2016), xv-xiii.

[17] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 10.

kesukaannya, orang akan cenderung menganggapnya benar dan langsung mempercayainya tanpa filter apapun. Misalnya, dalam kasus hoaks bahwa rokok menyehatkan, para perokok akan langsung percaya pada informasi tersebut tanpa peduli apakah itu hoaks atau fakta.[18]

Rasionalitas dalam kasus-kasus semacam itu hampir selalu kalah kuat ketimbang daya emosi sehingga benar tidaknya suatu pesan tidak lagi diperhatikan. Akibatnya, prosedur-prosedur wajar seperti cek fakta, klarifikasi, atau bertanya kepada para ahli cenderung tidak dilaksanakan orang-orang yang sudah terlalu dikuasai oleh afeksi dan perasaannya.

g. Bentuk informasi cenderung lebih dipentingkan daripada isi atau validitas informasi itu sendiri. Informasi yang disajikan dengan cara yang meyakinkan cenderung lebih dipercaya ketimbang isi atau validitas informasi itu sendiri. Padahal tidak jarang terjadi bahwa isi informasi hoaks tersebut sangat tidak masuk akal. Akan tetapi, karena cara pengemasannya begitu meyakinkan sebagai suatu "berita informatif", masyarakat mempercayainya sebagai fakta.[19]

Salah satu kasus yang sering dijadikan contoh adalah sebuah drama radio tentang penemuan *Unidentified Flying Object* (UFO) di Amerika Serikat.[20] Drama radio tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mirip seperti reportase berita, lengkap dengan reporter dan narasumber yang disebut-sebut "melihat sendiri UFO jatuh". Drama radio ini tersebar luas dan banyak dipercaya orang Amerika tanpa berusaha mencari atau memastikan validitas dan rasionalitas informasi tersebut sebagai suatu fakta. Di samping itu, "kasus Sokal" yang juga telah dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini merupakan contoh yang tepat untuk topik tersebut.

h. Kebenaran korespondensi diganti dengan kebenaran "konsensus". Ini adalah istilah teknis filosofis untuk mengatakan bahwa apa yang dipercaya sebagai kebenaran adalah informasi yang banyak tersebar ("konsensus"), bukan informasi yang sesuai dengan kenyataan (korespondensi).[21] Ketika pesan hoaks tersebar secara luas dan membanjiri pengetahuan semua orang tanpa ada counter yang memadai, pesan hoaks tersebut lama kelamaan akan diyakini sebagai kebenaran. Kendati irasional sekalipun, luasnya penyebaran dan kontinuitas pesan hoaks meningkatkan potensi hoaks itu dipercaya masyarakat.

---

[18] d'Ancona, 42.

[19] Michael E Sawyer, "Post-Truth, Social Media, and the 'Real' as Phantasm," dalam *Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges*, diedit oleh oleh Mikael Stenmark, Steve Fuller, dan Ulf Zackariasson (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 72.

[20] Sawyer, 72.

[21] Lee McIntyre, *Post-Truth* (Massachusetts: MIT Press, 2018), 18–21; J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 130.

Apa itu Kebenaran dan Masihkah Kebenaran Eksis?

Setelah melihat berbagai macam persoalan dan juga permasalahan yang sudah dibicarakan di atas, mungkin kita bertanya, "Jadi masih adakah kebenaran di Era Pasca-Kebenaran ini?" Pertanyaan semacam ini bisa dimengerti kemunculannya. Kebohongan dan kebenaran tidak begitu mudah lagi dibedakan. Akan tetapi, kita pun tidak boleh menjadi begitu pesimis akan adanya kebenaran.

Kebenaran, seperti dikatakan oleh Daniel J. Levitin dalam pengantar bukunya yang berjudul *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era*, harus dipercaya tetap ada. Kita harus menolak segala anggapan yang mengatakan bahwa kebenaran itu sudah hilang atau mati. Sebab kebenaran adalah pedoman dan patokan yang dibutuhkan dalam hidup bersama supaya harmonis. Pada dasarnya kebenaran itu bisa dicek keberadaannya, caranya adalah melihat data dan fakta objektif yang bisa ditemukan dan dibuktikan.[22]

Selain itu, Levitin juga menawarkan kepada kita suatu cara untuk dapat menempuh kembali kebenaran tersebut, kita harus kembali kepada kebenaran tradisional yang ada. Selama ini mungkin kita telah melalaikannya atau bahkan tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal dan memahami teori-teori kebenaran tradisional yang ada selama ini. Pada dasarnya, ada lima teori kebenaran, yakni kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatik, kebenaran performatif, dan kebenaran konsensus.[23] Marilah kita melihat kelima jenis kebenaran ini satu per satu sehingga kita mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai adanya suatu kebenaran.

Konsep kebenaran yang pertama adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi merupakan suatu kebenaran yang terjadi ketika pernyataan yang berada di dalam pikiran kita mengalami kesesuaian dengan realitas yang dirujuk. Dengan kata lain ada kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan. Hal ini sangat cocok dengan teori-teori pengetahuan empirik. Kebenaran semacam ini bisa ditemukan dalam hukum-hukum atau rumus-rumus fisika yang baru bisa dibenarkan setelah dibuktikan.

Konsep kebenaran yang kedua adalah kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi merupakan kebenaran yang harus mendapatkan semacam peneguhan dari berbagai sumber. Suatu hal bisa dikatakan sebagai benar ketika pernyataan yang mendukungnya dari berbagai pihak menunjukkan konsistensi. Konsistensi ini menunjukkan kekuatan daya dari kebenaran tersebut. Tanpa adanya konsistensi, maka akan menggoyahkan keberadaan suatu kebenaran.

---

[22] Levitin, *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post Truth Era,* xiii.

[23] Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, 129–35.

Konsep kebenaran yang ketiga adalah kebenaran pragmatik. Kebenaran pragmatik merupakan kebenaran yang memiliki hasil positif. Suatu hal dikatakan benar ketika suatu teori, dijalankan dan hasil atau dampak dari teori tersebut membuahkan hasil positif seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, suatu pernyataan dikatakan sebagai benar jika diuji dalam praktek atau suatu pengoperasionalan dan hasilnya memang membuktikan apa yang diandaikan.

Konsep kebenaran yang keempat adalah kebenaran performatif. Kebenaran ini merupakan kebenaran yang berjalan dan ada otoritas yang menguatkan kebenaran tersebut. Dalam kebenaran ini, otoritas menjadi kata kunci yang menguatkan kebenaran tersebut. Contohnya, ketika seorang Presiden mengangkat menterinya, tentu kata-kata pengangkatan yang diucapkan oleh Presiden sungguh bekerja dan meresmikan hal tersebut. Akan tetapi, jika kata-kata pengangkatan diucapkan oleh tukang ojek, maka kata-kata tersebut tidak berfungsi dan tidak relevan sama sekali.

Konsep kebenaran yang kelima adalah kebenaran konsensus. Kebenaran ini pertama-tama dicetuskan oleh Thomas Kuhn dan juga dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Kebenaran konsensus menunjukkan bahwa suatu teori ilmiah dianggap benar jika para ahli menyetujuinya atau mengambil kesepakatan bersama. Tentu para ahli di sini haruslah ahli-ahli yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang hebat dan cukup tinggi. Contohnya, para ahli kimia mengatakan bahwa air mendidih pada suhu seratus derajat. Hal tersebut disepakati oleh para ahli di seluruh dunia, dan oleh karena itu dianggap sebagai suatu kebenaran.

Kelima teori kebenaran di atas tidak bisa dihindarkan dari kekurangan-kekurangannya. Akan tetapi, dalam waktu-waktu sekarang ini, agar kebenaran dapat tercapai dengan baik dan juga tepat maka harus terjadi kombinasi atau keterkaitan antara teori-teori kebenaran yang ada. Mengapa hal ini harus dilakukan? Tujuannya adalah agar kebenaran yang disampaikan merupakan sungguh-sungguh kebenaran yang sahih dan tanpa celah untuk dimasuki oleh kebohongan dan kekeliruan.

Mengenai sebab, ciri, dan mekanisme fenomena Pasca-Kebenaran, kita dapat merujuk fakta-faktanya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, runtuhnya kepercayaan terhadap lembaga konvensional karena kekeliruan signifikan mereka. Di kalangan internasional, hal ini sudah cukup teridentifikasi dan diketahui publik secara luas. Salah satu contohnya adalah "kasus Sokal" yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, kasus sebesar itu memang tidak (atau belum) pernah terjadi. Namun demikian, tanda-tanda mengarah ke sana sudah mulai muncul.

Pada 31 Desember 2016, situs Antaranews.com milik kantor berita pemerintah, *Antara*, mengunggah berita berjudul "Bloomberg: Jokowi

pemimpin terbaik Asia-Australia 2016".[24] Dengan mengacu berita tersebut, beberapa situs berita daring lainnya mengunggah berita dengan judul serupa. Tetapi setelah diperiksa, ternyata Bloomberg tidak pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin terbaik.[25] Klarifikasi juga diberikan oleh David Tweed, penulis berita di Bloomberg dengan judul asli, "Who's Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016." Ketika ditanya lewat Twitter oleh akun Dwi Nugroho, "*Have u ever said that Joko Widodo is the best leader in Asia 4 2016? it's rummoured here in Indonesia*," Tweed menjawab singkat, "*No*".[26]

Hilangnya wibawa media massa resmi ini diperparah dengan kemunculan akun-akun berita gadungan yang menyajikan berita berpihak (*biased-news*). Dalam Pemilu Presiden RI 2014, misalnya, muncul surat kabar Obor Rakyat yang dengan mempublikasikan berita-berita—kebanyakan adalah hoaks—yang menjatuhkan salah satu pasangan calon.[27]

Di lain pihak, beberapa media massa resmi juga secara terselubung memihak pada kekuatan politik tertentu, entah itu berupa partai, calon presiden, atau oposisi. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam fenomena MetroTV, TVOne, dan MNC Group. Meskipun tidak secara resmi berafiliasi dengan partai tertentu, masyarakat dapat melihat bahwa pada saat itu MetroTV berhubungan erat dengan Partai Nasdem, TVOne dengan Partai Golkar, sementara MNC Group dengan Partai Perindo. Walaupun tidak semua media massa memiliki keberpihakan semacam itu, masyarakat telah telanjur kehilangan kepercayaan kepada media massa.

Contoh selanjutnya terkait dengan industri yang memproduksi dan mendistribusikan kebohongan. Contoh laporan ilmiah palsu mengenai rokok yang sengaja dibuat dan disebarluaskan ternyata pengaruhnya sampai juga ke Nusantara. Ada sebagian kalangan masyarakat yang percaya bahwa rokok menyehatkan alih-alih menyebabkan pelbagai penyakit serius. Hal ini diperparah dengan beredarnya beberapa pesan hoaks tentang manfaat rokok untuk mencegah beberapa penyakit.[28] Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyatakan telah berupaya

---

[24] Atut Syafril, "Bloomberg: Jokowi pemimpin terbaik Asia-Australia 2016," *Antara News*, 31 Desember 2016, https://www.antaranews.com/berita/604316/bloomberg-jokowi-pemimpin-terbaik-asia-australia-2016.

[25] Teguh Firmansyah, "Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016," *REPUBLIKA.co.id*, 2017, https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/oj6un1377/embloombergem-tak-menyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaaustralia-2016.

[26] Yulistyo Pratomo, "Klarifikasi Wartawan Bloomberg Soal Jokowi Pemimpin Terbaik Se-Asia," *merdeka.com*, 3 Januari 2017, https://www.merdeka.com/dunia/klarifikasi-wartawan-bloomberg-soal-jokowi-pemimpin-terbaik-se-asia.html.

[27] Elvan Dany Sutrisno, "Jejak Obor Rakyat: 'Hajar' Jokowi di 2014, Divonis 2016," *detiknews*, 2018, https://news.detik.com/berita/d-4340163/jejak-obor-rakyat-hajar-jokowi-di-2014-divonis-2016.

[28] Adi Syafitrah, "[SALAH] 'WHO : Merokok, Salah satu solusi pencegahan Covid-19.' – TurnBackHoax.ID," 2020, https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-who-merokok-salah-satu-solusi-pencegahan-covid-19/.

membantah kepercayaan keliru tersebut dengan berbagai cara. Akan tetapi, ada beberapa orang yang masih sulit diyakinkan dengan bantahan Kemenkes tersebut.[29]

Di Indonesia sendiri, industri produsen hoaks barangkali memang belum sebesar dan semasif di Amerika Serikat. Namun, bukan berarti produsen hoaks ini tidak berpotensi membahayakan masyarakat Indonesia. Kemkominfo sendiri mencatat bahwa terdapat 800.000 situs penyebar hoaks pada 2017.[30] Meskipun hingga awal 2020 belum ada data yang lebih mutakhir, namun dapat diprediksi jumlah situs abal-abal penyebar kebohongan tersebut sudah semakin bertambah berkali-kali lipat hingga sekarang.

Data di atas, selain menggambarkan industri produsen hoaks, juga menunjukkan bukti bahwa perkembangan teknologi dan informasi menyuburkan tersebarnya berita-berita hoaks di tengah masyarakat. Modal yang diperlukan bagi produsen hoaks sangat sederhana, yaitu cukup dengan telepon pintar dan internet. Dengan bekal tersebut, produsen hoaks bisa melangsungkan kegiatannya. Demikian pula penerima hoaks juga hanya membutuhkan telepon pintar dan akses inernet. Dari aplikasi WhatsApp mereka dapat memperoleh pelbagai macam berita atau pesan hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Berikutnya terkait dengan kecenderungan masyarakat yang malas untuk melakukan cek fakta, contoh kasus kebohongan Trump yang tidak diverifikasi sehingga dipercaya sebagai kebenaran tentu saja tidak hanya terjadi di Amerika saja. Di Indonesia, fenomena tersebut juga terjadi. Pasalnya, jika saja masyarakat lebih teliti dan rajin mengecek apakah suatu informasi merupakan fakta atau fiksi, tentu saja kabar-kabar hoaks tidak akan tersebar seperti yang sudah terjadi berulang kali.

Dalam grup-grup *WhatsApp* yang kita ikuti, kerapkali kita menemukan kecenderungan beberapa orang meneruskan suatu pesan tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran, validitas, dan kemasukakalan informasi yang termuat di dalamnya. Biasanya pesan hoaks yang beredar tidak dilengkapi dengan sumber yang jelas dan dapat dilihat bersama (misalnya: dapat dari grup sebelah, dari sumber terpercaya, dan sebagainya). Atau kemungkinan lainnya, kalaupun ada sumber yang dicantumkan, sumber itu tidak jelas, tidak berhubungan dengan isi pesan yang disebarkan, atau "asal ada sumbernya" saja. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kecenderungan

[29] Firdaus Anwar, "Ada yang Bilang Rokok Bermanfaat, Kemenkes: Itu Denying," *detikHealth*, 2017, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3407329/ada-yang-bilang-rokok-bermanfaat-kemenkes-itu-denying.

[30] Ayu Yuliani, "Kementerian Komunikasi dan Informatika," 2017, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media.

masyarakat Indonesia dalam memverifikasi informasi yang mereka dapatkan.

Setelah itu, contoh daya emosi lebih berpengaruh ketimbang daya rasio dalam menentukan kebenaran dapat diambil dari penelitian palsu tentang rokok di atas.[31] Ketika mendapatkan penelitian bahwa rokok tidak berbahaya, kaum perokok merasa terkonfirmasi dan terdukung untuk tetap merokok. Dalam fenomena tersebut, sebenarnya mereka hanya ingin mendengarkan apa yang ingin mereka dengarkan, untuk mendukung keyakinan mereka saja. Mereka merasa informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka adalah suatu kebenaran. Sebaliknya, mereka sesungguhnya tidak peduli akan apa yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Apalagi kalau suatu informasi ternyata berkebalikan dengan keyakinan atau kesenangan mereka, informasi tersebut akan serta merta dianggap salah. Padahal jika ditelaah secara ilmiah, informasi itu sungguh-sungguh benar sesuai dengan kenyataan.

Contoh selanjutnya terkait dengan lebih dipercayainya suatu informasi karena bentuknya yang meyakinkan ketimbang substansinya. Beberapa pesan hoaks yang beredar di masyarakat Indonesia melalui WhatsApp dikemas dengan cara yang baik sehingga seolah-olah menyerupai laporan ilmiah. Seringkali pesan hoaks bahkan dilengkapi dengan mencatut nama-nama tokoh publik yang termasyhur, ahli di bidang tertentu, pejabat pemerintahan, atau lembaga yang terpercaya.[32] Di samping itu, beberapa informasi hoaks sengaja dibuat sedemikian rupa dengan bantuan teknologi canggih agar menyerupai informasi asli, antara lain aplikasi editing gambar. Bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang mempercayai suatu informasi dengan berdasarkan bentuknya yang meyakinkan saja, hal ini menjadi salah satu jebakan yang efektif untuk menipu mereka.

Terakhir, contoh kebenaran "konsensus" yang lebih mendominasi daripada kebenaran korespondensi adalah pandangan masyarakat Indonesia mengenai kasus Rohingya di Myanmar, di mana terdapat dua kelompok yang berkonflik, yakni orang Myanmar dan orang Bangladesh-Myanmar (Rohingya). Masyarakat Indonesia terbiasa menerima informasi yang terus-menerus mengabarkan bahwa orang Rohingya dipersekusi dan dianiaya tanpa alasan yang jelas. Banjir informasi tersebut menimbulkan kesan tunggal bahwa orang Myanmar penindas dan penjajah sementara orang Rohingya adalah korban. Parahnya lagi, konflik dua kelompok bangsa tersebut kerap kali dibingkai dengan isu agama. Orang Myanmar yang mayoritas penganut Budhisme dicitrakan menganiaya orang Rohingya yang mayoritas penganut Islam. Ujung-ujungnya, konflik ini dipandang sebagai konflik atas nama agama.

---

[31] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 42.

[32] Liputan6.com, "Cek Fakta: Hoaks UNICEF Kirim Pesan Berantai Berisi Pencegahan Virus Corona," *liputan6.com*, 9 Maret 2020, https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4197676/cek-fakta-hoaks-unicef-kirim-pesan-berantai-berisi-pencegahan-virus-corona.

Padahal, apa yang sungguh terjadi di lapangan tidaklah sesederhana itu. Ada fakta-fakta yang tertutup oleh informasi tunggal yang dominan itu sehingga hampir tidak tersingkap sama sekali. Orang Rohingya dulunya adalah orang Bangladesh yang menjadi pendatang di Myanmar, tepatnya di daerah Rakhine. Kedatangan mereka menggusur penduduk setempat (pribumi) yang telah lama menempati wilayah Rakhine. Orang Rohingya juga dikenal eksklusif dan sulit berbaur dengan orang Myanmar pribumi. Ini dibuktikan dengan kekukuhan mereka mempertahankan budaya dan bahasa mereka sendiri, alih-alih menggunakan bahasa nasional Myanmar sebagai bahasa sehari-hari. Itulah mengapa hingga kini seolah terdapat jurang menganga dalam relasi mereka dengan orang Myanmar.[33]

Ketika Myanmar mulai beralih dari tangan penjajah Inggris ke negara mandiri, suku yang dulunya menempati daerah Rakhine tetapi tergusur oleh orang Rohingya ingin kembali ke tanah leluhurnya. Populasi Rohingya yang sedikitnya berjumlah satu juta orang itu diharapkan kembali ke tanah leluhur mereka di Bangladesh. Akan tetapi, mereka menolak dan ingin bertahan di Rakhine. Persengketaan wilayah ini berubah menjadi konflik berdarah manakala pemerintah Myanmar menggunakan pendekatan represif untuk menyelesaikan kasus ini.[34]

Dari penjelasan ini tampak jelas bahwa kasus Rohingya sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, melainkan sengketa wilayah geografis. Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa ini adalah isu agama, lebih tepatnya persekusi terhadap umat Muslim di Myanmar karena agama yang mereka anut. Hal ini terbukti dengan adanya aksi demonstrasi memprotes persekusi Rohingya yang dilakukan massa dengan mengatasnamakan agama di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta Pusat hingga berakhir ricuh.[35] Pembingkaian dengan isu agama sering kali dilakukan entah karena bias-bias pengetahuan tertentu atau sengaja dilakukan untuk kepentingan terselubung, seperti menggalang solidaritas orang-orang yang seagama. Pasalnya dengan bingkai isu agama, orang terbukti lebih mudah digerakkan dan diprovokasi ke arah dan tujuan tertentu.[36]

Dampak Fenomena Pasca-Kebenaran

Setelah menunjukkan bukti bahwa teori-teori tentang sebab, ciri, dan mekanisme fenomena Pasca-Kebenaran memang sungguh-sungguh terjadi

[33] Erin Blackmore, "The Rohingya People—Facts and Information," *Culture*, 8 Februari 2019, https://www.nationalgeographic.com/culture/article/rohingya-people.

[34] "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis," *BBC News*, 18 Oktober 2017, bag. Asia, https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561.

[35] Taufik Fajar, "Demo Rohingya di Jakarta Sempat Memanas, Massa Bakar Bendera Myanmar dan Lempari Polisi : Okezone Megapolitan," *okezone.com* 6 September 2017, https://megapolitan.okezone.com/read/2017/09/06/338/1770597/demo-rohingya-di-jakarta-sempat-memanas-massa-bakar-bendera-myanmar-dan-lempari-polisi.

[36] B. Herry-Priyono, "Ketegangan Agama dan Demokrasi," *Jurnal MASYARAKAT* 21, no. 1 (2017): 7–8.

dalam kenyataan dan lengkap dengan contoh faktanya, serta menjelaskan pula konsep-konsep dasar mengenai kebenaran itu sendiri, tulisan ini berlanjut dengan upaya menunjukkan contoh-contoh konkret dampak fenomena Pasca-Kebenaran, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, disorientasi dan kekacauan masyarakat. Dampak dari meluasnya berita bohong adalah masyarakat menjadi bingung dan bimbang. Mereka kesulitan membedakan manakah informasi yang benar dan dapat dipercaya serta manakah informasi yang bohong belaka. Ini juga dampak dari kegagalan lembaga-lembaga konvensional dalam memberikan kepastian pada masyarakat pada bidangnya masing-masing. Disorientasi dan kekacauan mengenai kebenaran di tengah masyarakat tersebut menjadikan mereka sangat rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk pelbagai kepentingan.

Contoh paling mutakhir adalah kabar hoaks yang banyak beredar tentang pasar ditutup serta isu lockdown membuat beberapa warga di Indonesia melakukan pembelian karena panik. Tidak tanggung-tanggung, hanya dalam sebulan sejak kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia, setidaknya terjadi tiga kali gelombang pembelian panik oleh masyarakat Indonesia. Padahal, faktanya persediaan barang di pertokoan sudah dijamin tetap mencukupi dan dapat dijangkau masyarakat kalaupun lockdown terjadi.[37]

Kedua, yakni pemanfaatan situasi chaos untuk kepentingan sempit. Kekacauan menjadi peluang dan kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mereguk keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pemanfaatan yang kerap terjadi adalah pemanfaatan ekonomi.[38] Pembelian karena panik sering kali memungkinkan beberapa oknum pedagang dan pengusaha mengambil kesempatan untuk mereguk keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga secara tidak rasional. Contoh konkret bagi terjadi ketika harga barang-barang yang dicari oleh masyarakat tiba-tiba meningkat drastis. Salah satu jenis barang yang dimaksud tersebut adalah bahan baku pembuatan jamu (*empon-empon*), seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur.[39] Jika ditelusuri, asal muasalnya adalah beredarnya berita hoaks bahwa jamu diyakini dapat menyembuhkan virus corona. Padahal, jangankan menyembuhkan, keyakinan bahwa jamu-jamuan dapat

[37] Cantika Adinda Putri, "Peritel Blak-Blakan Ada 3 Kali Panic Buying Gegara Corona," *CNBC Indonesia*, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200320104453-4-146366/peritel-blak-blakan-ada-3-kali-panic-buying-gegara-corona.

[38] Dany, "Kabar Bohong Melapangkan Jalan Korona."

[39] Alfian Winanto, "Dipercaya Bisa Tangkal Corona, Harga Jamu Naik Drastis," *suara.com*, 2020, https://www.suara.com/foto/2020/03/09/140113/dipercaya-bisa-tangkal-corona-harga-jamu-naik-drastis.

mencegah virus corona saja masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli.[40]

Ketiga, yakni merajanya populisme di kancah politik dan sosial kemasyarakatan.[41] Kekacauan dan disorientasi membuka peluang bagi para politikus yang populis untuk mengambil hati rakyat. Bentuknya bisa dengan menjanjikan program yang tidak realistis tetapi menarik, menyebarkan ketakutan dan memproklamasikan diri sebagai juru selamat, atau menyerang serta mendiskriminasi kelompok atau kalangan tertentu demi menyenangkan masyarakat luas supaya memperoleh dukungan. Rakyat yang sedang kacau dengan mudah dikelabui dan dibuai dengan omongan atau janji palsu para politisi populis tersebut. Pola seperti itu dapat terus berlanjut dan berulang bila tidak ada upaya untuk mengatasi kekacauan masyarakat akibat fenomena Pasca-Kebenaran.

Salah satu contoh untuk dampak populisme ini di luar negeri adalah Donald Trump yang berhasil meraih kepercayaan rakyat berkat janji-janji yang bombastis dan tidak realistis selama masa kampanye. Kemenangan Trump juga dibantu dengan beredarnya pelbagai hoaks (sebagian dibuat sendiri oleh Trump) yang isinya, antara lain, menyerang lawan politik Trump, Hillary Clinton.[42] Rakyat Amerika yang terprovokasi kabar bohong yang beredar tersebut akhirnya memenangkan Trump sebagai Presiden AS.

Pola yang kurang lebih sama terjadi dalam fenomena Brexit. Ketika wacana Brexit digulirkan, muncul banyak hoaks untuk menggerakkan orang Inggris supaya mendukung gagasan Brexit. Kabar bohong tersebut di antaranya menyatakan bahwa Inggris terlalu banyak memberi dana ke Uni Eropa, tetapi sebaliknya, kompensasi yang mereka terima tidak sepadan dengan kontribusinya. Kabar bohong lain berisi pelintiran atas poin-poin "Pakta Lisabon" yang membuat banyak orang Inggris merasa diperlakukan tidak adil sehingga bertekad keluar dari Uni Eropa.[43]

Akan tetapi selain itu, di Indonesia, hal yang sama juga dapat ditemukan dengan mencermati kampanye-kampanye politik para calon pemimpin menjelang Pemilu. Tanpa perlu menunjuk pada figur ini dan itu atau partai ini dan itu, kita dapat menilai sendiri mana sosok calon pemimpin atau partai yang populis, antara lain dengan membandingkan apakah janji-janji selama kampanye cukup ditepati ketika mereka akhirnya terpilih dan memperoleh kekuasaan. Dengan kata lain, tingkat kepopulisan figur atau

[40] Gloria Setyvani Putri, "Simpang Siur Curcumin pada Jahe dan Kunyit Terkait Corona, Apa Manfaat Sebenarnya? Halaman all," *KOMPAS.com*, 19 Maret 2020, https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/19/203100523/simpang-siur-curcumin-pada-jahe-dan-kunyit-terkait-corona-apa-manfaat.

[41] Gian Vittorio Caprara dan Michele Vecchione, *Personalizing Politics and Realizing Democracy* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2017), 287, 345-46.

[42] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 53–54.

[43] "There's a Lot Wrong with This Viral List about the Lisbon Treaty," *Full Fact*, 2019, https://fullfact.org/europe/viral-list-about-lisbon-treaty-wrong/.

kelompok politisi dapat diukur ketika mereka memperoleh kepercayaan untuk memegang kekuasaan.

Keempat, polarisasi horizontal di kalangan masyarakat. Dampak jangka panjang dari kekacauan masyarakat akibat gejala-gejala Pasca-Kebenaran pada akhirnya juga mengancam keharmonisan masyarakat itu sendiri. Adanya banjir informasi yang simpang siur kebenarannya dapat menyebabkan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat.[44] Masyarakat dapat terbelah, setidaknya dalam dua kubu, antara percaya atau tidak percaya pada suatu informasi tertentu. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kondisi ini berlanjut menjadi konflik dan bahkan perang sipil.

Contoh nyata atas dampak keempat di atas sangat dirasakan setelah gelaran Pilkada 2017 dan Pilpres 2020. Setelah Pilkada 2017, Jakarta seolah terbelah menjadi dua, yakni antara pendukung gubernur baru Anies Baswedan dan gubernur lama Basuki Tjahaja Purnama. Demikian pula selama masa kampanye bahkan hingga seusai Pilpres 2020, rakyat Indonesia seakan terbagi menjadi dua golongan, yaitu "cebong" dan "kampret".[45] Dalam situasi terpolarisasi seperti itu, masyarakat ada dalam kondisi rawan konflik maupun perpecahan.

Dari permasalahan hilangnya kredibilitas institusi konvensional, kerapkali timbul rasa penasaran dan gugatan, bagaimana mungkin kantor berita pemerintah mengunggah suatu berita yang ternyata tidak sesuai fakta? Di tengah maraknya kabar hoaks yang di tengah masyarakat, kegagalan media resmi mengabarkan berita yang benar menjadi preseden buruk. Kalau media resmi saja tidak dapat dipercaya kebenarannya, kepada siapa lagi masyarakat dapat percaya? Akibatnya, kepercayaan publik pada jurnalisme menjadi runtuh. Padahal, itulah yang sekarang ini sesungguhnya sangat dibutuhkan masyarakat. Di tengah era populisme yang gemar menyederhanakan segala sesuatu dan membesar-besarkan sekeping fakta yang tidak menyenangkan demi meraih popularitas pribadi, jurnalisme diharapkan mampu mengurai kompleksitas dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian, dari persoalan industri pencipta dan penyebar berita bohong, dapat ditangkap kesan kurangnya ketegasan pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkap, membungkam, dan menghukum mereka dengan adil sesuai ketentuan yang berlaku. Kemungkinan lainnya adalah hal ini merupakan ekses dari demokrasi yang kebablasan. Kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi tanpa batas akhirnya menimbulkan pula kebebasan untuk berbohong dan menyebarkannya.

Selanjutnya, dari masalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk penyebaran berita bohong, teknologi

[44] Andy Riza Hidayat, "Kabar Bohong di Medsos Picu Disintegrasi Bangsa," *Kompas.id*, 7 Desember 2019, https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/07/kabar-bohong-di-medsos-picu-disintegrasi-bangsa/.

[45] Fajar Yusuf Rasdianto Wiratama Syailendra Hafiz, "Melihat Residu Pemilu Cebong Vs Kampret Bekerja," *detikx*, Mei 2022, https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220509/Melihat-Residu-Pemilu-Cebong-Vs-Kampret-Bekerja/.

ternyata sudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk maksud yang buruk. Oleh sebab itu, teknologi perlu dikembalikan ke fungsi hakiki dan asalinya, yakni untuk membantu manusia alih-alih mengganggu mereka. Maka, teknologi harus digunakan sedemikian rupa untuk mendukung aktivitas manusia yang secara umum positif.

Berikutnya, dari persoalan kemalasan masyarakat mengecek fakta, perlu ada edukasi dan penyadaran akan pentingnya memverifikasi segala informasi apapun yang masuk. Di samping ketidaktahuan membedakan informasi yang benar dan salah, ketidakpedulian masyarakat akan kebenaran suatu informasi adalah salah satu alasan kunci fenomena Pasca-Kebenaran berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, ketidakpedulian dan ketidaktahuan harus dilawan secara konstan dengan sikap yang sebaliknya.

Kemudian dari persoalan bahwa semua kalangan terpapar fenomena Pasca-Kebenaran, masing-masing perlu sadar akan fungsinya dan saling membantu. Kalangan kurang terpelajar harus didorong untuk meng-upgrade literasi digital mereka. Sementara itu, kalangan terpelajar perlu diajak bertanggung jawab mengedukasi kalangan kurang terpelajar tentang bagaimana meminimalisasi penyebaran hoaks dan dari situ kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi hoaks juga dengan sendirinya terasah.

Lalu, dari problematika emosi lebih mempengaruhi kepercayaan ketimbang akal sehat, masyarakat perlu dikembalikan pada kesadaran bahwa segala informasi harus tetap diproses dengan akal sehat. Hanya akal sehat yang dapat mengidentifikasi, memilah-milah dan akhirnya memutuskan informasi mana yang benar dan seharusnya dapat dipercaya.

Demikian pula dari persoalan bentuk lebih menentukan kepercayaan ketimbang substansi, rasanya penting mencari cara bagaimana agar substansi kembali menjadi penentu apakah suatu informasi sungguh benar atau bohong. Pengemasan informasi yang meyakinkan memang penting, tetapi itu tidak mengalahkan pentingnya validitas substansi informasi. Isi informasi harus dijamin validitas dan ketepatannya terlebih dahulu, baru setelah itu dipikirkan pengemasannya, dan bukan sebaliknya.

Akhirnya, dari masalah kebenaran konsensus yang mendominasi, kebenaran korespondensi perlu dikembalikan arti pentingnya. Jangan sampai suatu informasi yang keliru dibiarkan terus-menerus beredar di tengah masyarakat tanpa bantahan atau klarifikasi. Pasalnya informasi yang salah namun tidak diperbaiki pada akhirnya akan menjadi biasa dan diterima sebagai kebenaran. Inilah asal muasal banyak hal yang salah, tetapi dipercaya (kaprah) oleh banyak orang.

Sesungguhnya, dampak Pasca-Kebenaran tidak seluruhnya negatif. Ada pula dampak positifnya, yakni kebenaran tidak lagi didominasi oleh otoritas tertentu. Dominasi kebenaran oleh otoritas tertentu rawan sekali untuk disalahgunakan, lebih-lebih bila otoritas pemegang kebenaran tersebut

mempunyai kepentingan tertentu, misalnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebagai contoh, pada era Orde Baru, pemerintah memegang secara nyaris mutlak segala akses informasi, pengetahuan, bahkan narasi sejarah, sebut saja tentang Peristiwa G30S. Akibatnya hanya ada satu versi sejarah yang benar dan diakui kebenarannya, yakni versi pemerintah. Masalahnya belum tentu sejarah versi pemerintah tersebut memang sesuai dengan kenyataan. Setelah Orde Baru tumbang, mulai bermunculanlah narasi-narasi lain tentang sejarah bangsa yang lama terepresi oleh narasi tunggal pemerintah. Namun demikian kini timbullah masalah baru, yakni sejauh mana narasi-narasi alternatif ini memang sesuai dengan kenyataan? Sebab versinya ada banyak sekali dan hampir semuanya terlihat masuk akal.

Mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh fenomena Pasca-Kebenaran, sudah jelas bahwa pengaruhnya sangat terasa bagi segenap elemen masyarakat. Sebagian besar kalangan merasa dirugikan oleh dampak-dampak negatif fenomena Pasca-Kebenaran. Kalaupun ada yang diuntungkan, mereka adalah oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kekacauan masyarakat untuk kepentingan sempit pribadi dan kelompoknya. Oleh sebab itu, jika persoalan-persoalan itu dapat diatasi, niscaya dampak-dampak fenomena Pasca-Kebenaran yang sudah terbukti mengganggu keharmonisan, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat dapat dicegah pula agar jangan sampai terjadi.

Solusi Permasalahan untuk Menyongsong Tahun Politik 2024

Pada tahun 2024, rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi secara besar-besaran. Tidak hanya memilih presiden-wakil presiden serta anggota legislatif, di tahun yang sama Indonesia juga akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk kepala daerah (kendati tanggal dan bulannya berbeda). Pemilu Presiden mendatang akan menghadirkan calon-calon pemimpin bangsa yang bukan petahana (*non-incumbent*) sebagaimana tahun 2019 (karena saat ini Presiden Joko Widodo telah memerintah selama dua periode). Menimbang fakta-fakta tersebut dan belajar dari kenyataan sejarah yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas, dapat diprediksi bahwa fenomena Pasca-Kebenaran akan kembali bermunculan pada tahun mendatang bak cendawan di musim hujan. Oleh sebab itu, solusi yang tepat atas dampak negatif Pasca-Kebenaran harus ditemukan dan diaplikasikan.

Solusi atas masalah Pasca-Kebenaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu solusi preventif dan kuratif. Sesungguhnya, selama ini solusi baik secara preventif maupun kuratif sudah diupayakan. Secara preventif, pemerintah melalui Kemkominfo telah melakukan pendidikan dan literasi digital kepada masyarakat, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak-pihak swasta lainnya. Sementara itu secara kuratif, misalnya, pemerintah pernah melakukan pemblokiran akses internet serta pengurangan kecepatan internet (*throttling*) ketika terjadi

kekacauan publik, misalnya saat terjadi kerusuhan 22-24 Mei 2019[46] serta kerusuhan di Papua dan Papua Barat[47].

Solusi preventif tadi memang sudah baik dan patut dilanjutkan, tetapi perlu metode dan cara yang lebih efektif supaya dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas lagi. Sementara itu, untuk solusi kuratif yang telah disebut tadi, banyak pihak menganggapnya kurang bijaksana. Pasalnya, kendati ulah para penyebar hoaks berhasil diredam dengan kebijakan throttling tersebut, para pengguna media internet lain yang punya kehendak dan kepentingan baik juga turut terkena dampaknya.

Dampak negatif yang timbul dari kebijakan throttling, antara lain dialami mereka yang ingin berkirim kabar kepada keluarga di kampung halaman atau mendapatkan informasi aktual tentang situasi di sekitar wilayah kerusuhan serta para pegiat ekonomi daring (*e-commerce*). Mereka sungguh menghadapi kesulitan serius ketika throttling tersebut diberlakukan.[48] Budi Kurniawan mengkritik kebijakan tersebut dengan analogi "berburu tikus tetapi dengan cara sekaligus mengebom rumahnya".[49] Selain itu, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menganggap kebijakan kuratif pemerintah telah melanggar hak warga negara untuk mendapatkan informasi.[50]

Sesuai dengan teori, hoaks diproduksi untuk mencari keuntungan pribadi serta menimbulkan kebingungan dan disorientasi masyarakat demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena solusi yang sudah dikerjakan selama ini kurang memadai, maka solusi alternatif atau komplementer yang perlu diupayakan seharusnya bersifat multidimensional, atau dengan kata lain melibatkan pelbagai bidang. Solusi

---

[46] Iskandar, "Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Pembatasan Fitur WhatsApp Cs," liputan6.*com*, 22 Mei 2019, https://www.liputan6.com/tekno/read/3973187/penjelasan-lengkap-menkominfo-soal-pembatasan-fitur-whatsapp-cs.

[47] PDSI KOMINFO, "Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data Di Papua Dan Papua Barat," *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, diakses 12 Oktober 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers; Deti Mega Purnamasari, "Pembatasan Akses Internet di Papua, Tujuan Mulia yang Tuai Pro dan Kontra Halaman all," *KOMPAS.com*, 23 Agustus 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/07172221/pembatasan-akses-internet-di-papua-tujuan-mulia-yang-tuai-pro-dan-kontra.

[48] Luwu Palopo dan Amran Amir, "Dampak Pembatasan Media Sosial Penjualan 'Online' Anjlok," *KOMPAS.com*, 25 Mei 2019, https://regional.kompas.com/read/2019/05/25/11264241/dampak-pembatasan-media-sosial-penjualan-online-anjlok.

[49] Aloysius Budi Kurniawan, "Pemblokiran Internet di Papua Ibarat Berburu Seekor Tikus dengan Mengebom Rumah," *Kompas.id*, 25 Agustus 2019, https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/25/pemblokiran-internet-di-papua-ibarat-berburu-seekor-tikus-dengan-mengebom-rumah/.

[50] Christoforus Ristianto, "ICJR: Pemblokiran Internet di Papua Tak Hormati Hak Publik Dapat Informasi," *KOMPAS.com*, 23 Agustus 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/10104011/icjr-pemblokiran-internet-di-papua-tak-hormati-hak-publik-dapat-informasi.

yang ingin ditawarkan dalam tulisan ini untuk menyelesaikannya adalah solusi edukasi filosofis, sosiologis, teknologis, dan estetis (seni) atau disingkat "Solusi Empat-IS". Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. *Solusi edukasi filosofis*. Secara teoretis fenomena Pasca-Kebenaran menyadarkan kita akan pentingnya daya kritis serta penelitian yang teliti dan serius. Ada banyak klaim kebenaran yang bertebaran di antara kita. Semuanya tampak meyakinkan dan "benar". Filsafat Pengetahuan atau Epistemologi menyediakan beberapa teori untuk menilai klaim-klaim kebenaran tersebut.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat lima teori kebenaran, yakni kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, dan konsensus. Lima teori tersebut harus dikombinasikan untuk menilai suatu kebenaran secara utuh. Salah satu teori saja yang dipakai secara terlalu fanatik dapat mendistorsi kebenaran. Misalnya, ada banyak informasi yang "katanya" sesuai fakta. Tapi bila dicermati, informasi itu ternyata tidak masuk akal, tidak koheren, tidak disampaikan oleh yang otoritatif, dan tidak diterima kesahihannya oleh pihak-pihak yang relevan. Jika hanya teori kebenaran korespondensi saja yang digunakan, sulit sekali untuk menilai kebenarannya.

Selain itu, tidak kalah penting pula membiasakan diri hidup dalam pluralisme pengetahuan. Konkretnya adalah dengan tidak hanya berpuas diri menerima satu sumber (corak) pengetahuan saja. Sebab seperti sudah dijelaskan sebelumnya algoritma internet dewasa ini berpotensi memasukkan kita dalam ruang gema (echo chamber). Kita hanya terekspos oleh kabar atau pengetahuan yang ingin kita ketahui saja, tetapi kabar atau pengetahuan yang tidak kita sukai, kendati itu benar, akan dijauhkan dari kita. Maka amatlah penting untuk mencoba menilik liyan, yang berbeda dari kita agar kita punya perspektif alternatif. Dari situ kita dapat menentukan dengan daya kritis, mana yang benar dan mana yang salah.[51]

b. *Solusi teknologis*. Solusi kedua datang dari dalam teknologi itu sendiri. D'Ancona percaya bahwa teknologi punya potensi untuk memulihkan dirinya sendiri dari kekacauan yang ditimbulkannya.[52] Teknologi internet dan media sosial memang berkontribusi dalam berkembangnya fenomena Pasca-Kebenaran. Namun, teknologi yang sama juga menjanjikan sarana yang efektif untuk melawan Pasca-Kebenaran. Sekarang ini bermunculan beberapa situs pemeriksa fakta. Kabar atau ucapan seseorang bisa dengan mudah diuji kebenarannya dengan data atau kenyataan yang pernah terekam di internet. Masyarakat sebenarnya sudah dapat menggunakannya dengan mudah untuk menangkal kebohongan.

Sebenarnya dapat didesain pula sistem yang lebih canggih daripada itu. Jika aplikasi pengecek fakta mengandaikan ada orang yang mengelolanya,

[51] McIntyre, *Post-Truth*, 162–64.

[52] d'Ancona, *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*, 116–18.

sekarang sedang dikaji kemungkinan mengonstruksi suatu kecerdasan buatan (*artificial intelligence* [AI]) untuk mendeteksi berita hoaks secara otomatis. Mekanismenya kurang lebih demikian. Jika ada suatu berita terdeteksi sebagai hoaks, alat ini akan mampu melacak ke mana saja hoaks itu telah tersebar secara otomatis. Secara otomatis pula, alat ini akan memberi tanda pada setiap pesan hoaks yang terkirim sehingga siapa saja orang yang menerimanya akan langsung tahu bahwa pesan tersebut hoaks. Dengan begitu, identifikasi hoaks dapat menjadi lebih efektif dan efisien ketimbang yang terjadi sekarang.

Ide ini berangkat dari keberhasilan membuat alat pendeteksi kebohongan (*lie-detector*) berbasis teknologi AI yang dapat mengidentifikasi kebohongan secara otomatis tanpa perlu dikendalikan oleh manusia.[53] Jika AI pendeteksi hoaks itu berhasil diciptakan, maka seluruh pernyataan bohong yang beredar di sosial media atau internet akan mudah terbasmi dengan sendirinya.

Kendati begitu, masih terbuka keraguan: siapa yang menentukan benar-bohongnya suatu pernyataan? Bukankah bila alat tersebut dikuasai oleh mereka yang berniat buruk, bisa saja yang terjadi justru pernyataan benarlah yang dibasmi? Harus diakui bahwa solusi teknologis memang tidak dapat menyelesaikan persoalan apabila tidak dikombinasikan dengan solusi-solusi lainnya.

c. *Solusi sosiologis*. Di era Pasca-Kebenaran ini, fakta saja tak cukup. Sangatlah perlu menyajikan fakta dengan cara tertentu untuk membangkitkan emosi. Mengapa? Sebab persis itulah cara kerja fake news dan hoax: berfokus pada mengaduk-aduk emosi masyarakat. Dengan cara itulah, salah satunya, kebohongan dapat dilawan dan dikalahkan. Misalnya, di surat kabar atau media elektronik, berita sering ditayangkan dalam bentuk fitur (feature). Di dalamnya sering kali jurnalis menyelipkan kisah yang menggugah emosi pemirsa, entah untuk merasa iba, tergerak untuk menolong, hingga berkobar untuk mengubah keadaan yang tidak ideal. Di era Pasca-Kebenaran ini, fakta perlu lebih banyak dikemas dalam bentuk yang menyentuh nurani sebagai penyeimbang bagi hoaks yang acap kali disajikan pula dengan cara serupa.

Hal yang tidak kalah penting adalah keterlibatan para pakar yang diharapkan lebih besar lagi. Mereka sebaiknya jangan hanya lihai menyajikan fakta hasil kajian dan penelitian mereka secara formal belaka (lewat jurnal, publikasi ilmiah), tapi ikut terlibat aktif pula memerangi kabar bohong yang tersebar dalam forum-forum masyarakat biasa, entah itu di media sosial, surat kabar, maupun televisi.

Menurut d'Ancona, era Pasca-Kebenaran telah menghasilkan jenis narasi tersendiri yang khas.[54] Narasi Pasca-Kebenaran acap kali didasarkan

[53] d'Ancona, 122–24.

[54] d'Ancona, 131–34.

pada kepentingan bertahan hidup atau sintas (*survival*). Asumsinya, manusia adalah makhluk yang mudah bereaksi manakala kepentingan sintasnya diusik. Manusia secara instingtif cenderung mendekati hal-hal yang mengenakkan dan menghindari hal-hal yang membahayakan sintasnya, sehingga narasi Pasca-Kebenaran sering kali bernuansa kuat kebencian dan ketakutan. Padahal, manusia tidak hanya dideterminasi oleh kepentingan sintasnya saja. Kalau itu sepenuhnya benar, maka ia tidak berbeda sama sekali dengan hewan. Faktanya, manusia memiliki fakultas rasio yang dapat mengatasi naluri hewaninya.

Psikolog Abraham Maslow meyakini bahwa kebutuhan meta manusia mampu menaklukkan kebutuhan dasar naluriahnya. Inilah yang semestinya mendasari kontra narasi terhadap narasi Pasca-Kebenaran. Yang perlu dikedepankan dalam kontra narasi Pasca-Kebenaran adalah nilai-nilai metasintas manusia, seperti keutuhan, penerimaan, pemberian diri, dll. Jika narasi Pasca-Kebenaran mengasumsikan rakyat sebagai anak kecil yang gampang ditakut-takuti dan diprovokasi, maka narasi kontra Pasca-Kebenaran memandang rakyat sebagai orang dewasa yang tahu mana baik dan mana buruk, mampu memilih dengan bijaksana, dan ingin diperlakukan secara egaliter. Lakukan ini dengan konsisten dan setia, maka perlahan namun pasti masyarakat akan beranjak dari narasi Pasca-Kebenaran.

Namun sebelum itu semua, apakah kita sungguh yakin bahwa rakyat memang sudah dewasa dan menyadari kedewasaannya? Terkadang belenggu kemiskinan dan kebodohan serta ketidakpuasan terhadap situasi sekarang ini dapat mengaburkan kesadaran mereka. Kendati orang berpendidikan pun tidak luput dari fenomena Pasca-Kebenaran, bukan rahasia pula bahwa kabar bohong masih banyak dipercaya oleh kalangan masyarakat yang berpendidikan dan berkesejahteraan rendah. Artinya, fenomena Pasca-Kebenaran dapat dimaknai sebagai indikator bahwa sedang ada permasalahan status quo. Oleh sebab itu, merebaknya fenomena Pasca-Kebenaran juga sebaiknya dijadikan momentum untuk kembali memperhatikan kesejahteraan, kecerdasan, dan aktualisasi potensi masyarakat.

Pertanyaan lanjutannya, sejauh manakah kita dapat yakin bahwa cara-cara di atas akan berhasil melawan fenomena Pasca-Kebenaran yang terbukti sukses mempengaruhi masyarakat di hampir seluruh penjuru dunia? Kita tidak pernah tahu. Namun dalam realitas, ada secercah harapan bahwa populisme yang memakai Pasca-Kebenaran sebagai senjata ternyata tidak selalu sukses. Contohnya, politikus populis seperti Geert Wilders yang memainkan isu Islamophobia dengan kebohongan di Belanda ternyata mengalami kekalahan dalam pemilihan umum pada 2017.

Ketika kekalahan populisme di Belanda ini diamati secara lebih detail, ternyata kunci kemenangan lawannya adalah kerendahan hati untuk mendengarkan rakyat dan kejujuran untuk memperlakukan warga negara

sebagai orang dewasa dan rasional.[55] Ini tentu berbeda dengan populisme Pasca-Kebenaran yang narasinya cenderung menyerang dengan galak dan agresif serta mengeksploitasi kebencian dan ketakutan masyarakat. Fakta ini menjadi setitik cahaya bagi kita yang masih meyakini supremasi kebenaran, yakni bahwa Pasca-Kebenaran bukanlah fenomena yang tak dapat teratasi.

d. *Solusi estetis*. Fenomena Pasca-Kebenaran adalah suatu situasi yang tidak ideal di tengah masyarakat. Untuk menyikapinya, kita juga dapat menempuh jalan estetika/seni. Konkretnya, kita dapat membuat satire dan parodi mengenai fenomena Pasca-Kebenaran yang merebak di mana-mana. Kita dapat menertawakan kebodohan dan kekonyolan kita yang begitu mudah percaya kebohongan, sampai-sampai tidak yakin apakah kebenaran objektif masih eksis sekarang ini.

Stand-up comedy menjadi salah satu contoh parodi yang sedang *trending* belakangan ini. Para komika (komedian) mampu melontarkan materi komedi yang terinspirasi dari realitas di masyarakat yang kerap kali tidak rasional dan janggal. Masyarakat diajak untuk berintrospeksi atas keanehan dan ketidakmasukakalan sikap dan perilaku mereka sendiri dengan cara yang menyenangkan. Cara ini diharapkan efektif juga untuk melawan fenomena Pasca-Kebenaran secara tak langsung.

Bukan cuma itu, solusi terakhir ini bahkan dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk mewujudkan kemampuannya. Ada peluang ekonomi lewat industri hiburan yang dapat dikembangkan melalui jalan estetika. Secara bersamaan fungsi pendidikan bagi masyarakat juga dapat disisipkan. Ini merupakan sesuatu yang menarik, yakni bahwa bahkan di dalam fenomena Pasca-Kebenaran sekalipun tersimpan suatu potensi bagi masyarakat untuk berkembang apabila itu dapat teraktualisasi dengan baik.

Saran yang ingin tulisan ini ajukan berkaitan dengan siapa saja pihak-pihak yang dapat dilibatkan untuk mengatasi era Pasca-Kebenaran. Terdapat setidaknya enam pihak yang dapat membantu terlaksananya "Solusi Empat-IS", yakni pemerintah, media, pesohor publik (*public figure*), ahli teknologi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas.

a. Pemerintah. Syarat utama keterlibatan pemerintah adalah sedapat mungkin bebas dari kepentingan politik sempit dan bermaksud tulus untuk menyajikan kebenaran kepada masyarakat. Pemerintah wajib menjadi aktor utama dalam melawan fenomena Pasca-Kebenaran dan hoaks dengan mengajak semua pihak yang berkehendak baik untuk berkolaborasi. Pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk program melawan hoaks secara serius. Pemerintah juga dapat mendorong inisiatif masyarakat untuk rajin mengecek fakta dengan memberi insentif bagi warga yang berhasil mengidentifikasi hoaks dan melaporkannya.

b. Media. Kalangan media massa sebaiknya membantu pemerintah dalam melawan hoaks dengan melakukan cek fakta. Berbekal data dan akses

[55] d'Ancona, 135–36.

informasi yang luas, awak media adalah pihak yang tepat untuk dirujuk dalam mengidentifikasi suatu informasi termasuk fakta atau hoaks.

c. Pesohor publik. Para pesohor, termasuk di dalamnya seniman, artis, selebritis, YouTuber, pemengaruh (*influencer*), dan terkhusus komedian, dapat menjadi mitra pemerintah untuk melawan hoaks lewat bidang keahlian mereka. Hoaks dan fenomena Pasca-Kebenaran yang sedang viral di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai objek seni. Tidak hanya itu, melalui jalan yang sama tersebut mereka juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

d. Ahli teknologi. Para ahli teknologi sebaiknya mulai memikirkan bagaimana caranya membuat aplikasi cek fakta otomatis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan algoritme berdasarkan hasil kerja para pengecek fakta. Dengan begitu hoaks yang beredar secara liar di dunia digital dapat diidentifikasi dan diredam secara lebih efektif.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran LSM yang tidak kalah vital adalah mengawasi kinerja pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek melawan hoaks agar jangan sampai keliru, sewenang-wenang, atau ditunggangi kepentingan tertentu. Sebab kekeliruan semacam itu mungkin terjadi dan dalam sejarah memang pernah terjadi. Contohnya, saat pemerintah keliru mengidentifikasi hoaks mengenai kerusuhan Papua[56] atau saat kantor berita resmi milik pemerintah (Antara) salah mengutip berita dari Bloomberg[57].

f. Masyarakat luas. Di samping pihak-pihak yang secara khusus disebut di atas, semua pihak seharusnya dilibatkan dalam upaya luhur dan mulia ini. Karena salah satu faktor berkembangnya era Pasca-Kebenaran adalah kepasifan masyarakat dalam mengkritisi informasi atau memastikan kebenaran suatu kabar, maka masyarakat dituntut aktif mendukung usaha melawan hoaks ini. Setiap warga dapat terlibat dalam kapasitasnya masing-masing dengan cara yang sederhana. Misalnya, para guru dapat mengajarkan cara memilah informasi pada murid-muridnya; ibu rumah tangga dapat menahan diri untuk tidak mudah meneruskan informasi yang diterimanya dari media sosial; dan sebagainya.

Kesimpulan

Pasca-Kebenaran adalah suatu fenomena yang tak terelakkan dalam perkembangan zaman. Era Pasca-Kebenaran ditandai dengan kesimpangsiuran mengenai apa yang benar dan tidak benar. Banyak hal yang sesungguhnya salah tetapi dianggap benar karena pelbagai faktor.

[56] Ihsanuddin dan Fabian Januarius Kuwado, "PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua," *KOMPAS.com*, 3 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/13550661/ptun-presiden-ri-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua.

[57] Syafril, "Bloomberg"; Firmansyah, "Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016"; Pratomo, "Klarifikasi Wartawan Bloomberg Soal Jokowi Pemimpin Terbaik Se-Asia."

Faktor-faktor tersebut, di antaranya kesalahan signifikan yang dilakukan lembaga-lembaga yang terpercaya secara konvensional, munculnya institusi produsen dan distributor hoaks, perkembangan teknologi yang disalahgunakan, serta kecenderungan masyarakat yang malas memverifikasi informasi.

Adapun fenomena Pasca-Kebenaran ini ternyata tidak hanya mengenai kalangan tidak berpendidikan, tetapi juga kaum intelektual dan bahkan para ahli. Di era Pasca-Kebenaran, masyarakat juga cenderung mengedepankan daya perasaan ketimbang daya nalar rasional untuk menilai kebenaran suatu informasi. Selain itu, bentuk suatu informasi lebih mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ketimbang isi informasi itu sendiri. Akhirnya, di era Pasca-Kebenaran, orang lebih mempercayai apa yang tersebar secara masif daripada apa yang sesuai dengan kenyataan faktual.

Pelbagai aspek dari fenomena Pasca-Kebenaran tersebut terbukti telah menghasilkan dampak-dampak yang buruk bagi masyarakat. Fenomena Pasca-Kebenaran mengakibatkan masyarakat kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan salah sehingga terjadi kebingungan dan disorientasi hingga apatisme terhadap kebenaran. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menjadi rentan untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya secara sempit. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah para populis karena berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat lewat kebohongan mereka. Dalam jangka panjang, jika situasi Pasca-Kebenaran tidak diatasi, masyarakat berpotensi menjadi terpecah belah dan mudah terpantik konflik, perpecahan, hingga perang sipil. Dalam tahun politik 2024, risiko ini sangat rentan terjadi bila kita berkaca dari sejarah.

Oleh karena persoalannya begitu rumit dan kompleks, maka penyelesaiannya pun mesti sistematis dan multidimensional. "Solusi Empat-IS" yang ditawarkan dalam tulisan ini dapat dijadikan alternatif ataupun pelengkap bagi solusi-solusi yang sudah dikerjakan selama ini. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini harus terdiri dari pelbagai bidang kemampuan. Intinya adalah semua pihak yang punya kepedulian dan kehendak untuk mengatasi masalah hoaks, berita bohong, dan sebagainya yang menandai era Pasca-Kebenaran harus bersedia campur tangan demi kebaikan bersama seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

Sumber Cetak

Ancona, Matthew d'. *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*. London: Ebury Press, 2017.

Caprara, Gian Vittorio, dan Michele Vecchione. *Personalizing Politics and Realizing Democracy*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2017.

Herry-Priyono, B. "Ketegangan Agama dan Demokrasi." *Jurnal MASYARAKAT* 21, no. 1 (2017): 1–34.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Isu Hoaks Corona Virus,* 13 Maret 2020 (versi PDF).

Keyes, Ralph. *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press, 2004.

Levitin, Daniel J. *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post Truth Era*. New York: Dutton, 2016.

McIntyre, Lee. *Post-Truth*. Massachusetts: MIT Press, 2018.

Sawyer, Michael E. "Post-Truth, Social Media, and the 'Real' as Phantasm," dalam *Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges*, diedit oleh Mikael Stenmark, Steve Fuller, dan Ulf Zackariasson, 65–80. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sumber Daring

"Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis." *BBC News*. 18 Oktober 2017, bag. Asia. https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561.

"There's a Lot Wrong with This Viral List about the Lisbon Treaty," *Full Fact.* 2019. https://fullfact.org/europe/viral-list-about-lisbon-treaty-wrong/.

Anwar, Firdaus. "Ada yang Bilang Rokok Bermanfaat, Kemenkes: Itu Denying." *detikHealth*, 2017. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3407329/ada-yang-bilang-rokok-bermanfaat-kemenkes-itu-denying.

Blackmore, Erin. "The Rohingya People—Facts and Information." *Culture*, 8 Februari 2019. https://www.nationalgeographic.com/culture/article/rohingya-people.

Dany, Fransiskus Wisnu Wardhana. "Kabar Bohong Melapangkan Jalan Korona." *Kompas.id*, 17 Maret 2020. https://www.kompas.id/baca/metro/2020/03/18/kabar-bohong-melapangkan-jalan-korona/.

Fajar, Taufik. "Demo Rohingya di Jakarta Sempat Memanas, Massa Bakar Bendera Myanmar dan Lempari Polisi ." *Okezone Megapolitan* https://megapolitan.okezone.com/, 6 September 2017. https://megapolitan.okezone.com/read/2017/09/06/338/1770597/demo-rohingya-di-jakarta-sempat-memanas-massa-bakar-bendera-myanmar-dan-lempari-polisi.

Firmansyah, Teguh. "Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016." *REPUBLIKA.co.id*, 2017. https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/oj6un1377/embloombergem-tak-menyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaaustralia-2016.

Galiartha, Gilang. "Daftar media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers." *Antara News*, 5 Februari 2017. https://www.antaranews.com/berita/610730/daftar-media-yang-sudah-terverifikasi-oleh-dewan-pers.

Hidayat, Andy Riza. "Kabar Bohong di Medsos Picu Disintegrasi Bangsa." *Kompas.id*, 7 Desember 2019. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/07/kabar-bohong-di-medsos-picu-disintegrasi-bangsa/.

Ihsanuddin, dan Fabian Januarius Kuwado. "PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua." *KOMPAS.com*, 3 Juni 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/13550661/ptun-presiden-ri-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua.

Iskandar. "Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Pembatasan Fitur WhatsApp Cs." *liputan6.com*, 22 Mei 2019. https://www.liputan6.com/tekno/read/3973187/penjelasan-lengkap-menkominfo-soal-pembatasan-fitur-whatsapp-cs.

KOMINFO, PDSI. "Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data Di Papua Dan Papua Barat." *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. Diakses 12 Oktober 2023.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers.

Kurniawan, Aloysius Budi. "Pemblokiran Internet di Papua Ibarat Berburu Seekor Tikus dengan Mengebom Rumah." *Kompas.id*, 25 Agustus 2019. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/25/pemblokiran-internet-di-papua-ibarat-berburu-seekor-tikus-dengan-mengebom-rumah/.

Liputan6.com. "Cek Fakta: Hoaks UNICEF Kirim Pesan Berantai Berisi Pencegahan Virus Corona." *liputan6.com*, 9 Maret 2020. https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4197676/cek-fakta-hoaks-unicef-kirim-pesan-berantai-berisi-pencegahan-virus-corona.

Lusi, Semuel S. "Melampaui 'Post-Truth.'" *detiknews*, Mei 2019. https://news.detik.com/kolom/d-4534507/melampaui-post-truth.

Mega Purnamasari, Deti. "Pembatasan Akses Internet di Papua, Tujuan Mulia yang Tuai Pro dan Kontra Halaman all." *KOMPAS.com*, 23 Agustus 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/07172221/pembatasan-akses-internet-di-papua-tujuan-mulia-yang-tuai-pro-dan-kontra.

Palopo, Luwu, dan Amran Amir. "Dampak Pembatasan Media Sosial Penjualan 'Online' Anjlok." *KOMPAS.com*, 25 Mei 2019. https://regional.kompas.com/read/2019/05/25/11264241/dampak-pembatasan-media-sosial-penjualan-online-anjlok.

Pratomo, Yulistyo. "Klarifikasi Wartawan Bloomberg Soal Jokowi Pemimpin Terbaik Se-Asia." *merdeka.com*, 3 Januari 2017. https://www.merdeka.com/dunia/klarifikasi-wartawan-bloomberg-soal-jokowi-pemimpin-terbaik-se-asia.html.

Putri, Cantika Adinda. "Peritel Blak-Blakan Ada 3 Kali Panic Buying Gegara Corona." *CNBC Indonesia*, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200320104453-4-146366/peritel-blak-blakan-ada-3-kali-panic-buying-gegara-corona.

Reynas. "Data Kominfo Tunjukkan Jumlah Konten Berita Hoax Meningkat Tajam Sejak Pertengahan Tahun Lalu." *Tribunnews.com*, 25 April 2019. https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/25/data-kominfo-tunjukkan-jumlah-konten-berita-hoax-meningkat-tajam-sejak-pertengahan-tahun-lalu.

Ristianto, Christoforus. "ICJR: Pemblokiran Internet di Papua Tak Hormati Hak Publik Dapat Informasi." *KOMPAS.com*, 23 Agustus 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/10104011/icjr-pemblokiran-internet-di-papua-tak-hormati-hak-publik-dapat-informasi.

Setyvani Putri, Gloria. "Simpang Siur Curcumin pada Jahe dan Kunyit Terkait Corona, Apa Manfaat Sebenarnya?" *KOMPAS.com*, 19 Maret 2020. https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/19/203100523/simpang-siur-curcumin-pada-jahe-dan-kunyit-terkait-corona-apa-manfaat.

Sokal, Alan D. "A Physicist Experiments With Cultural Studies," 1996. https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html.

Susilawati, Desy. "Begini Dampak Berita Hoax." *REPUBLIKA.co.id*, 2017. https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoax.

Sutrisno, Elvan Dany. "Jejak Obor Rakyat: 'Hajar' Jokowi di 2014, Divonis 2016." *detiknews*, 2018. https://news.detik.com/berita/d-4340163/jejak-obor-rakyat-hajar-jokowi-di-2014-divonis-2016.

Syafitrah, Adi. "[SALAH] 'WHO : Merokok, Salah satu solusi pencegahan Covid-19.' – TurnBackHoax.ID," 2020. https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-who-merokok-salah-satu-solusi-pencegahan-covid-19/.

Syafril, Atut. "Bloomberg: Jokowi pemimpin terbaik Asia-Australia 2016." *Antara News*, 31 Desember 2016. https://www.antaranews.com/berita/604316/bloomberg-jokowi-pemimpin-terbaik-asia-australia-2016.

Tim. "Malas Verifikasi Berita Jadi Penyebab Penyebaran Hoaks." *CNN Indonesia*, 2018. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181016231419-185-339048/malas-verifikasi-berita-jadi-penyebab-penyebaran-hoaks.

Winanto, Alfian. "Dipercaya Bisa Tangkal Corona, Harga Jamu Naik Drastis." *suara.com*, 2020. https://www.suara.com/foto/2020/03/09/140113/dipercaya-bisa-tangkal-corona-harga-jamu-naik-drastis.

Wiratama, Fajar Yusuf Rasdianto, Syailendra Hafiz. "Melihat Residu Pemilu Cebong Vs Kampret Bekerja." *detikx*, Mei 2022. https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220509/Melihat-Residu-Pemilu-Cebong-Vs-Kampret-Bekerja/.

Yuliani, Ayu. "Kementerian Komunikasi dan Informatika," k*ominfo.go.id*, 2017. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media.